HUKUM AKAD BAI' YANG DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK DI SEBUAH WARUNG

BAI' LEGAL CONTRACT DONE BY CHILDREN IN A FOOD STALL

Nugraha Pranadita

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nisantara,
Jl. Soekarno Hatta No. 530 Kota Bandung 40286
email:¹nugpra@yahoo.com

Abstrak. *Al Qur'an obliges children to treat their parents nicely and respectfully. Meanwhile, parents also have the obligation to take care of themselves and their families from hell fire of afterlife. Due to the concept of the rights and obligations, children's rights are parents' obligations and vice versa. In accordance, the implementation of Bai' contract for the children ordered by their parents has a position as an obligation, while parents' order is a right. Bai' contract is a concept part of muamalah activities. Muamalah is considered as religious dimension of economic activities. The religious activities of muamalah developed and has been set as the positive law in Indonesia through the implementation of Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) or Compilation of Syariah Economy Law. The chosen theme of muamalah as a living institution in society made this research empirical. It is used primary data and socio legal research method with analysis media of responsive law theory. The result of this research is a fact that Bai' contract conducted by the children is a common contract which usually takes place in a food stall. The conclusion of this research are (1) Bai' contract conducted by the children is legal, and (2) the Bai' contract is legal related to the facade of its legal subjects.*

Keywords: KHES, Bai' contract, muamalah

Abstrak. *Al Qur'an mewajibkan anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sementara itu orang tua juga diberi kewajiban untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Menurut konsep hak dan kewajiban, hak anak adalah kewajiban orang tua. Demikian juga sebaliknya, kewajiban anak adalah hak orang tua. Dalam hal ini pelaksanaan akad bai' oleh anak-anak atas perintah orang tuanya telah memposisikan tindakan anak-anak tersebut sebagai sebuah kewajiban, sedangkan perintah orang tua adalah hak. Akad bai' adalah sebuah konsep yang menjadi bagian dari kegiatan muamalah. Sedangkan muamalah adalah kegiatan perekonomian yang berdimensi keagamaan. Dalam perkembangannya kegiatan keagamaan dalam bentuk muamalah tersebut dijadikan hukum positif di Indonesia melalui penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian terkait dengan muamalah sebagai sebuah lembaga yang hidup di masyarakat. Dengan demikian menempatkan penelitian yang dimaksud sebagai sebuah penelitian yang bersifat empiris menggunakan data primer dan metode socio legal research (penelitian sosiologi hukum) dengan teori hukum responsif sebagai sarana analisisnya. Temuan penelitian ini adalah fakta bahwa akad bai' yang dilakukan oleh anak-anak merupakan akad yang biasa terjadi di sebuah warung. Sedangkan kesimpulan penelitian ini adalah; (1) akad bai' yang dilakukan oleh anak-anak adalah sah, dan (2) hukum akad bai' tersebut merupakan akad sah yang fasad terkait dengan masalah subyek hukumnya.*

Kata Kunci: KHES, akad bai' , warung

1. Pendahuluan

Di dalam Al Qura'an kewajiban seorang anak kepada orang tua diantaranya adalah sebagai berikut:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. QS. Al Israa 17:23¹. Lihat juga QS Luqman/31:15².

Meskipun demikian, di dalam Al Qur'an juga terdapat larangan bagi seorang anak untuk mematuhi orang tuanya sebagai berikut:

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapakmu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. QS. Al Ankabuu/29:8³. Lihat juga QS. Luqman/31:14⁴.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah berbuat kebaikan. Kebaikan disini didefinisikan sebagai; "sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku"⁵. Dengan demikian "kebaikan" disini dipengaruhi oleh faktor tempat dan waktu. Sebagai contoh; di negara-negara "barat", menempatkan orang tua di panti werdha (panti jompo) boleh jadi dianggap sebagai perbuatan baik anak kepada orang tuanya. Lain halnya dengan di Indonesia, menempatkan orang tua di panti werdha dapat diartikan sebagai keengganan anak untuk mengurus orang tuanya. Kemauan seorang anak untuk melaksanakan akad *bai'* di sebuah warung atas perintah orang tuanya, atau dengan niat membantu orang tuanya merupakan salah satu bukti perbuatan baik anak kepada orang tuanya.

Dilain pihak, orang tua juga mempunyai kewajiban kepada anak. Diantaranya:

1. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. QS. At Tahrim/66:6.
2. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". QS. Luqman/31:13.

¹ AL ISRAA', <http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/17/20>, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 08.20 WIB.

² "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

³ AL'ANKABUUT (Laba-laba), <http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/17/20>, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 08.24 WIB.

⁴ "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

⁵ Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Kebaikan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebaikan>, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 08.32 WIB.

3. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). QS. Luqman/31:17.

Uraian tentang kewajiban anak dan kewajiban orang tua menurut Al Quran sebagaimana telah diuraikan diatas terkait secara langsung dengan kenyataan di masyarakat, yaitu adanya akad⁶ dalam bidang muamalah, khususnya *bai'*, yang dilakukan oleh anak-anak⁷, sebagai salah satu implementasi perbuatan baik anak kepada orang tuanya. Dengan memperhatikan kewajiban anak dan orang tua, serta syarat sahnya sebuah akad menurut syariah, maka rumusan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; (1) apakah akad *bai'* yang dilakukan oleh anak sesuai dengan syarat sahnya sebuah akad?, dan (2) bagaimana hukum akad *bai'* yang dilakukan anak tersebut?

2. Landasan Teori

Sebagaimana sebuah penelitian empiris lainnya, penelitian inipun menggunakan data primer sebagai bahan hukum primernya. Data primer tersebut diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan. Penelitian empiris/lapangan ini dikenal juga sebagai penelitian *socio legal research* (penelitian sosiologi hukum). Pada pokoknya pemikiran *socio legal research* adalah memposisikan hukum bukan hanya sebagai produk legislasi, tetapi lebih kepada produk sosial sebagai hasil dari interaksi antar individu di dalam masyarakat. Dalam hal ini ilmu-ilmu sosial digunakan sebagai alat/sarana dalam melakukan penelitian. Dengan demikian hukum bukan hanya produk lembaga hukum, tetapi merupakan produk lembaga sosial kemasyarakatan juga. Sebagai contoh; di masyarakat sunda, apabila ada peristiwa kematian (kedukaan) maka masyarakat sekitar akan menunjukkan perasaan belasungkawanya dengan datang ke rumah orang/keluarga yang mengalami musibah dengan membawa/menyerahkan “amplop” yang berisi uang. Tidak ada hukum (formal) yang mengatur hal tersebut, tetapi masyarakat tetap menaatinya sebagai sebuah hukum.

Penelitian hukum yang bersifat empiris harus disertai penerapan teori hukum yang bersifat empiris juga. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick. Salah satu kajian utama teori hukum responsif adalah adanya kontrol sosial di dalam masyarakat yang bekerja mengatur institusi-institusi sosial dimana terjadi suatu peristiwa hukum tertentu. Dalam penelitian ini, warung tempat dilaksanakannya penelitian yang dimaksud merupakan sebuah institusi sosial dimana terjadi sebuah peristiwa hukum yang dikenal sebagai akad, salah satu bentuk operasionalisasi hukum syariah (khususnya muamalah) di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Adalah benar tidak semua kontrol sosial adalah hukum, seperti mengucapkan kata “permisi” pada saat kita berjalan melewati orang lain. Hal tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai etika. Berbeda halnya dengan akad yang terjadi di sebuah warung, walaupun akad tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial, tetapi menjalankan fungsinya sebagai hukum yang dapat menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum.

⁶ “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”. Pasal 20 Nomor 1 KHES.

⁷ Pasal 1 Nomor 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); “Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Syarat Sahnya Akad Kaitannya Dengan Usia Dewasa

Akad terkait dengan kegiatan muamalah sebagaimana syariah mengaturnya. Saat ini hukum positif terkait dengan kegiatan muamalah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Menurut peraturan yang dimaksud, akad adalah sah apabila sesuai dengan⁸; (1) syariat Islam, (2) peraturan perundang-undangan, (3) ketertiban umum, dan atau (4) kesusilaan. Sedangkan rukun akad adalah; (1) pihak-pihak yang berakad, (2) obyek akad, (3) tujuan pokok akad, dan (4) kesepakatan. Di dalam beribadah, rukun⁹ adalah syarat sahnya ibadah yang dimaksud. Muamalah (yang dilaksanakan melalui akad-akadnya) selain berdimensi sosial kemasyarakatan, tetapi juga berdimensi keagamaan. Dengan demikian terpenuhinya rukun muamalah/akad menentukan sahnya muamalah/akad yang dimaksud. "Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya"¹⁰. Rukun dan syarat-syarat sahnya suatu akad merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Masalah utama penelitian ini adalah terkait dengan kriteria anak-anak. Menurut syariah ukuran bukan anak-anak adalah *ihtilam*. Salah satu ciri *ihtilam* ini adalah tumbuhnya bulu kemaluan dan atau haid khusus untuk perempuan¹¹. Syariah tidak menentukan batas dewasa berdasarkan usia. Sedangkan dewasa menurut peraturan perundang-undangan terdapat beberapa perumusan yang berbeda, diantaranya yaitu; (1) menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak berusia dibawah 18 tahun, (2) menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin orang tua, mempelai pria minimal 19 tahun dan mempelai wanita minimal 16 tahun, dan (3) menurut KUHPerdara menentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang usianya belum genap 21 tahun. Sesungguhnya KHES tidak secara spesifik menentukan usia sebagai syarat untuk melakukan akad. Syarat usia justru timbul karena adanya syarat sahnya akad yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan akad adalah Pasal 1320 KUHPerdara (sahnya sebuah persetujuan), yaitu adanya; (1) kesepakatan, (2) kecakapan, (3) suatu pokok tertentu, dan (4) sebab yang tidak terlarang. Ketentuan inipun sesungguhnya tidak secara eksplisit menentukan batas usia dewasa seseorang, tetapi hanya mensyaratkan adanya kecakapan. Pada kenyataannya kecakapan selalu dikaitkan dengan kedewasaan. Dengan demikian kecakapan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPer terkait dengan usia adalah minimal 21 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 330 KUHPer.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ihtilam* sebagai tanda kedewasaan menurut syariah secara serta merta berubah menjadi batas kedewasaan

⁸ Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Rukun*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukun>, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 18.34 WIB.

¹⁰ Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹¹ Nahrowi & Ade Rizky, *Dewasa Menurut Hukum Islam*, http://www.academia.edu/10006005/Dewasa_Menurut_Hukum_Islam, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 18.58 WIB.

menurut peraturan perundang-undangan¹². Berdasarkan uraian diatas, terdapat batas bawah dan batas atas kriteria anak-anak, yaitu; batas bawah usia anak-anak adalah sebelum *ihtilam*, sedangkan batas atas usia anak-anak adalah sebelum genap berusia 21 tahun. Meskipun KHES tidak secara eksplisit menentukan batas usia sebagai syarat sahnya sebuah akad, tetapi patut diduga secara wajar bahwa *ihtilam* adalah batas minimum usia seseorang untuk dapat disebut cakap melakukan akad atau perbuatan hukum lainnya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Akad Bai' di Warung

Akad *bai'* adalah akad yang paling umum (sering) terjadi di sebuah warung. Untuk mengetahui seberapa banyak anak-anak yang melakukan akan *bai'* di warung, maka penelitian ini diadakan di sebuah warung yang beralamat di Gang Situsaeur Timur 11 Nomor 102/198B RT. 05 RW. 01 Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya, maka kriteria anak-anak dalam penelitian ini adalah maksimal mereka yang diperkirakan masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagaimana diuraikan di dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Akad Bai' di Warung

No.	Tanggal	Bai'	Bai Dewasa	Bai' Anak-Anak
1	11 September 2017	46	31	15
2	12 September 2017	61	47	14
3	13 September 2017	53	35	18
4	14 September 2017	38	24	14
5	15 September 2017	52	40	12

Sumber: Data Primer

Fakta-fakta yang diketahui oleh peneliti melalui penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad *bai'* di warung biasa juga dilakukan oleh anak-anak.
2. Nilai akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak relatif kecil, berkisar dibawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Pada umumnya obyek akad *bai'* adalah jajanan yang biasa dibeli oleh anak di warung.
4. Dijumpai juga beberapa obyek akad *bai'* berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga, atau kebutuhan orang dewasa.
5. Tidak dijumpai akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak tersebut salah sehingga harus "diperbaiki"¹³.

¹² Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

¹³ Yang dimaksud "diperbaiki" disini adalah barangnya kurang/lebih atau salah, atau harganya harus dikurangi/ditambah.

Hukum Akad Bai' Yang Dilakukan Anak-Anak

Hukum di dalam Islam dibagi menjadi hukum *wadl'i* dan hukum *taklifi*¹⁴. Hukum *wadl'i* terdiri dari; (1) hukum sebab, (2) hukum syarat, dan (3) penghalang hukum. Sedangkan hukum *taklifi* (tuntutan) terdiri dari; (1) kebebasan melakukan atau tidak melakukan, (2) anjuran untuk melakukan, (3) seyogyanya tidak dilakukan, (4) perintah untuk melakukan, dan (5) larangan untuk melakukan. Hukum Islam juga dikategorikan menjadi *Al Akhkam Al Khamzah*, yaitu; (1) wajib/fardu, terdiri dari fardu *ain* (perseorangan) dan fardu *kifayah* (kelompok), (2) sunat, (3) haram, (4) makruh, dan (5) mubah/jaiz.

Sedangkan terkait dengan akad terdapat tiga kategori hukum, yaitu¹⁵; (1) akad yang sah, (2) akad yang *fasad*/dapat dibatalkan, dan (3) akad yang batal/batal demi hukum. Terdapat kesesuaian antara kategori hukum terhadap akad dengan kategori syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara, yaitu; (1) syarat subyektif, dan (2) syarat obyektif. Syarat subyektif terdiri dari adanya kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat obyektif terdiri dari adanya suatu pokok tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Tidak terpenuhinya syarat subyektif sebuah perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*fasad*). Adapun tidak terpenuhinya syarat obyektif sebuah perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan pembagian hukum Islam, akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak termasuk hukum *wadl'i*, syarat hukum. Dalam hal ini hukum mensyaratkan bahwa subyek hukum harus cakap dimana salah satu kriteria cakap adalah terkait dengan usia. Sedangkan dilihat dari kategori hukum, akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak termasuk kategori mubah (jaiz), yaitu; “segala sesuatu yang tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan atau tidak dilarang, tidak berpahala dan tidak berdosa bila seseorang melakukan atau tidak melakukan”¹⁶.

Seperti telah diuraikan diatas, usia terkait dengan kecakapan yang merupakan syarat subyektif sebuah perjanjian. Dengan demikian akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak tersebut hukum akadnya adalah *fasad* (dapat dibatalkan). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menempatkan kecakapan sebagai syarat subyektif sebuah perjanjian yang ketiadaannya dapat menyebabkan perjanjian yang dimaksud dapat dibatalkan. Dalam hal ini terdapat kesesuaian yang nyata antara ketentuan hukum yang terdapat dalam KHES dengan KUHPerdara.

4. Kesimpulan

1. Akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak adalah akad yang sah karena sesuai dengan syarat sahnya sebuah akad. Syarat sahnya sebuah akad tidak secara eksplisit menentukan syarat umur, lebih terkait dengan masalah kecakapan subyek hukum.
2. Karena kecakapan subyek hukum (anak-anak) dapat dipertanyakan, maka akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak tersebut menjadi akad *fasad* (akad yang dapat dibatalkan). Pembatalan akad *bai'* yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dapat dilalukan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHES maupun KUHPerdara. Yang membedakan disini adalah yurisdiksi pengadilannya. KHES

¹⁴ Renny Supriyatni B., 2011, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm. 52-54.

¹⁵ Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹⁶ Renny Supriyatni B., 2011, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm. 55.

dioperasionalkan di Pengadilan Agama, sedangkan KUHPerdada dioperasionalkan di Pengadilan Negeri.

Daftar Pustaka

Al Qur'an

Al Qur'an, <http://www.dudung.net/quran-online/indonesia/2>, diunduh hari Kamis tanggal 18 September 2017.

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Kebaikan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebaikan>, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 08.32 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, *Rukun*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukun>, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 18.34 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Nahrowi & Ade Rizky, *Dewasa Menurut Hukum Islam*, http://www.academia.edu/10006005/Dewasa_Menurut_Hukum_Islam, diunduh hari Senin tanggal 18 September 2017 jam 18.58 WIB.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung.

Renny Supriyatni B., 2011, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung, Widya Padjadjaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.